

**STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JOMBANG NOMOR: 724/Pdt.G/2007/PA.Jbg  
TENTANG PEMBATALAN NIKAH DENGAN ALASAN TIDAK ADA IZIN WALI  
MENURUT PERSPEKTIF MAZHAB HANAFTY**

**SKRIPSI**



**Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
Ilmu Syariah**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2010 OCC AS	No. REG : S-2010/AS/OCC ASAL BUKU : TANGGAL :

**Oleh :**

**Mochammad Masrur  
NIM : C01304118**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN AHWALUS SYAKHSIYAH**

**SURABAYA  
2010**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

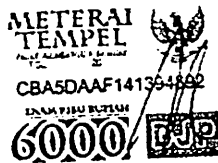
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mochammad Masrur  
NIM : C01304118  
Jurusan : Ahwalus Syakhsiyah  
Fakultas : Syariah  
Alamat : Jl. Mawar No. 11 Dusun Banjar Anyar, Desa Tinggar,  
Kecamatan Bandar Kedung Mulyo Kabupaten Jombang

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Studi Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor: 724/Pdt.G/PA.Jbg Tentang Pembatalan Nikah Dengan Alasan Tidak Ada Izin Wali Menurut Perspektif Mazhab Hanafiy”** adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 25 Januari 2009



MOCHAMMAD MASRUR  
NIM. C01304118















# BAB I

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Allah menjadikan makhluk di dunia ini secara berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Hikmahnya adalah untuk saling melengkapi, hidup dua sejoli sebagai suami isteri dan membangun rumah tangga yang damai dan tentram. Untuk itu haruslah diadakan ikatan yang kokoh dan langgeng, yaitu sebuah pernikahan yang sah di bawah tuntunan agama dan negara.

Pernikahan adalah salah satu kodrat dalam perjalanan hidup manusia. Pernikahan bukan hanya sekedar jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan menuju pintu pengenalan, akan tetapi menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. Di samping itu, pernikahan merupakan jalan untuk menghindarkan manusia dari kebiasaan hawa nafsu yang menyesatkan.

Pernikahan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting. Pernikahan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan pernikahan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibangun

Oleh karena itu, pada tempatnyalah apabila Islam mengatur masalah pernikahan dengan amat teliti dan terperinci untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain. Hubungan manusia laki-laki dan perempuan ditentukan agar didasarkan atas rasa pengabdian kepada Allah sebagai *Al-Khālīq* (Maha Pencipta) dan kebaktian kepada kemanusiaan guna melangsungkan kehidupan jenisnya.

Pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang telah diikat dengan ikatan suci pernikahan, apabila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan tuntunan hukum yang ada baik agama maupun negara, maka akan membawa keberkahan dan kebahagiaan, baik bagi diri sendiri dan keturunan maupun bagi masyarakat banyak, baik di dunia dan di akhirat. Sebaliknya pergaulan liar antara laki-laki dan perempuan tanpa menghiraukan ikatan suci pernikahan dan tuntunan agama, pasti akan membawa bahaya dan malapetaka, baik bagi yang bersangkutan maupun keturunan dan masyarakat, baik di dunia dan di akhirat.

Perkawinan dalam hukum Islam disebut dengan nikah, yaitu suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang





Disamping itu wali juga harus beragama Islam, sebab orang yang bukan beragama Islam tidak boleh menjadi walinya orang Islam.<sup>4</sup>

**Allah SWT berfirman:**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ...

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi wali (mu)... (Q.S Al Mā'idah [5]: 51).*<sup>5</sup>

Menurut istilah *fiqh*, perwalian ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.<sup>6</sup>

**Di dalam KHI Pasal 20 ayat 1 disebutkan bahwa wali nikah terdiri dari:**

1. Wali Nasab
2. Wali Hakim

Di dalam pasal 21 KHI juga diterangkan kriteria-kriteria tentang wali nasab, yaitu:

1. Wali Nasab terdiri atas empat kelompok, dalam urutan kedudukan kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

<sup>4</sup>Slamet Abidin, *Fiqh Mumakahat* I,h.83

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 194

<sup>6</sup>Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, h. 92

فَا لِسُلْطَانُ وَلِيٍّ مِّنْ لَا وَلِيٍّ لَهُ



Pada tanggal 29 Mei 2007 Pengadilan Agama Jombang mengabulkan permohonan pemohon dan membatalkan pernikahan termohon Sumilah binti Suparno yang dilaksanakan di KUA Diwek Jombang pada tanggal 9 April 2007.

Dengan adanya kasus tersebut, maka penulis menganggap perlu untuk meneliti dan menganalisa putusan Hakim Pengadilan Agama Jombang tentang perkara pembatalan nikah dengan alasan tidak ada izin wali tersebut berdasarkan perspektif mazhab Hanafiy. Oleh karena itu, penulis mencoba membahasnya dalam penelitian ini yang berjudul *“Studi Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor: 724/Pdt.G/2007/Pa.Jbg tentang Pembatalan Nikah dengan Alasan Tidak Ada Izin Wali Menurut Perspektif Mazhab Hanafiy”*.



### C. Kajian Pustaka

Masalah pembatalan nikah sebenarnya sudah banyak yang membahas, terutama para ilmuwan dan para ahli hukum. Namun permasalahan yang mereka bahas tidak hanya berfokus pada satu topik, melainkan menyeluruh tentang pembatalan nikah baik itu dari segi hukum positif atau dari segi hukum Islam (*fiqh*), seperti yang dikemukakan oleh Lili Rasjidi dalam bukunya yang berjudul *"Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia"*. Beliau mengemukakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 6-12 UU No.1 Tahun 1974. Hal serupa dikemukakan oleh Sudarsono dalam bukunya *"Hukum Perkawinan Nasional"*.

1. Apa pertimbangan dan dasar hukum Hakim Pengadilan Agama Jombang dalam membatalkan nikah karena tidak ada izin wali, perkara nomor: 724/Pdt.G/2007/PA.Jbg?
2. Bagaimana analisis putusan Pengadilan Agama Jombang nomor: 724/Pdt.G/2007/PA.Jbg tentang pembatalan nikah dengan alasan tidak ada izin wali menurut perspektif mazhab Hanafiy?

Begitu juga dengan beberapa penelitian yang telah ditulis terlebih dahulu, seperti skripsi yang berjudul *“Putusan Hakim Tentang Perkara Pembatalan Nikah Karena Salah Wali di Pengadilan Agama Nganjuk”* oleh Muhammad Rosyidin. Inti dari skripsi tersebut adalah penyebab terjadinya pembatalan nikah karena salah wali, yang terjadi di Pengadilan Agama Nganjuk, disebabkan karena keawaman dari pihak-pihak tergugat yang kurang mengerti mengenai hukum Islam terutama pada masalah perwalian. Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas masalah pembatalan nikah sedangkan perbedaannya terletak pada objek pembahasan yakni kalau skripsi penulis pembatalan nikah disebabkan karena tidak ada izin wali, sedangkan dalam skripsi saudara Muhammad Rosyidin pembatalan nikah disebabkan karena salah wali.

Sedangkan pembahasan dalam penelitian ini ialah mengenai pembatalan nikah disebabkan karena tidak ada izin wali menurut perspektif mazhab Hanafiy.

Jadi, penelitian ini bukanlah suatu pengulangan atau duplikasi dari karya sebelumnya.

#### D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Jombang dalam membatalkan nikah dengan alasan tidak ada izin wali, perkara nomor: 724/Pdt.G/2007/PA.Jbg.
2. Untuk mengetahui analisis putusan Pengadilan Agama Jombang nomor: 724/Pdt.G/2007/PA.Jbg tentang pembatalan nikah dengan alasan tidak ada izin wali menurut perspektif mazhab Hanafiy.

## E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang ditulis dalam skripsi ini diharapkan bermanfaat sekurang-kurangnya dalam dua hal sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis, yaitu dapat dijadikan acuan pada penelitian berikutnya khususnya yang menyangkut perkara pembatalan nikah karena tidak ada izin wali, selain itu sebagai nilai tambah penulis yang bergelut dalam dunia hukum untuk meningkatkan sekaligus mempraktekkan ilmu yang selama ini diperoleh dari IAIN Sunan Ampel Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Al- Syakhsiyah.

2. Kegunaan secara praktis, yaitu dapat dijadikan sebagai bahan untuk merumuskan program pembinaan kemasyarakatan sebelum pernikahan berlangsung, sehingga perkara pembatalan nikah tersebut tidak terulang kembali.

## F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami judul penelitian ini maka akan diuraikan definisi operasional sebagai berikut.

1. Putusan ialah Keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.<sup>9</sup> Akan tetapi, putusan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor: 724/Pdt.G/2007/Pa.Jbg.
2. Pembatalan nikah ialah pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan gugatan atau tuntutan dari pihak isteri atau suami yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama, atau karena perkawinan yang telah terlanjur menyalahi ketentuan-ketentuan hukum Islam.<sup>10</sup> Sedangkan definisi pembatalan nikah dalam skripsi ini yakni pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama Jombang berdasarkan tuntutan dari pihak pemohon, yaitu Muhammad Kamaluddin Hasan terhadap termohon, yaitu Sumilah binti

<sup>9</sup>Team Media Centre, *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama*, h. 95

<sup>10</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, h.126





- Penulis mengadakan wawancara dan tanya jawab langsung dengan hakim dan panitera Pengadilan Agama Jombang yang bertugas menangani perkara tersebut, untuk memperoleh data-data tentang

putusan dan dasar pertimbangan para hakim dalam menyelesaikan perkara pembatalan nikah karena tidak ada izin wali.

### b. Dokumentasi

Pada studi ini penulis mencari dan mengumpulkan data yang berasal dari catatan atau arsip-arsip tersimpan dan juga buku-buku yang terkait dengan penelitian ini, sehingga penulis dapat memahami, mencermati dan menganalisis data sekunder tersebut.

#### 4. Teknik Analisis Data

Setelah penulis mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut penulis analisis dengan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau keadaan dalam putusan Pengadilan Agama Jombang nomor: 724/Pdt.G/2007PA.Jbg kemudian dianalisis berdasarkan perspektif mazhab Hanafiy. Hasil analisis akan penulis simpulkan dalam bentuk deskripsi sebagai hasil pemecahan persoalan yang ada.

## H. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan penelitian ini penulis membagi dalam lima bab, di mana mulai bab I sampai dengan bab V merupakan rangkaian dari bab-bab yang saling berkaitan. Untuk lebih jelasnya uraian sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.



Bab pertama, merupakan bab pendahuluan, yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab ke dua, adalah bab tentang landasan teori atau kerangka konseptual, yang mendeskripsikan tentang konsep perwalian dan pembatalan nikah menurut perspektif mazhab Hanafiy.

Bab ke tiga, ialah bab yang membahas tentang data penelitian, yang terdiri dari pembahasan tentang kedudukan dan kewenangan Pengadilan Agama Jombang, deskripsi kasus tentang perkara permohonan pembatalan nikah, serta pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutus perkara pembatalan nikah di Pengadilan Agama Jombang.

Bab ke empat, yaitu bab mengenai analisis putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor: 724/Pdt.G/2007/PA.Jbg tentang pembatalan nikah dengan alasan tidak ada izin wali menurut perspektif mazhab Hanafiy.

Bab ke lima, adalah bab penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



Sa'idiy di Madinah, namun beliau tidak pernah bertemu dengan seorangpun diantara mereka. Dengan demikian mazhab ini adalah mazhab yang tertua diantara mazhab-mazhab *Ahlus Sunnah*.

### a. Menuntut Ilmu

Seperti kebiasaan ulama lainnya, masa kecilnya dilalui dengan menghafal al-Qur'an kemudian beberapa hadits-hadits penting. Sedangkan kehidupan ilmiyahnya dimulai dengan menekuni Ilmu Kalam, mungkin dikarenakan kondisi masyarakat Irak yang saat itu banyak perbedaan dan perdebatan masalah akidah sehingga memberikan pengaruh terhadap kecenderungan Abū Ḥanīfah muda. Namun lama-kelamaan beliau menyadari bahwa selama ini ia telah mengikuti jalan yang tidak pernah diikuti para salafuna ash-shalih dan sibuk dengan perdebatan-perdebatan yang tidak jelas manfaatnya. Inilah yang menjadi faktor asasi perubahan haluan ilmu beliau ke bidang *fiqh* yang lebih nampak manfaatnya di tengah masyarakat.

Dalam belajar *fiqh*, Imam Abū Ḥanīfah mengambil *fiqh* ulama Kūfah dari berbagai aliran dan metode yang ada di sana, sementara sebagaimana yang kita ketahui bahwa *fiqh* Kūfah secara umum bermuara pada metode beberapa orang tokoh seperti Aliy bin Abī Ṭalīb, Ibnu Mas'ūd, 'Alqamah (murid Ibnu Mas'ūd) dan Ibrāhīm an-Nakhā'iy, metode mereka itu diistilahkan dengan *fiqh al-qiyās wa at-takhrīj*.

Setelah beberapa lama mengembara mendengar dan belajar dari ulama-ulama Kūfah, akhirnya Imam Abū Ḥanīfah r.a mengambil sikap untuk belajar *fiqh* secara khusus dari seorang ulama saja atau yang dikenal dengan istilah *mulāzamah*, dalam hal ini beliau belajar kepada Ḥammād bin Abī Sulaimān r.a yang merupakan murid ‘Alqamah bin Qais r.a (murid Ibnu Mas‘ūd r.a) sekitar awal abad ke dua hijriyah. Imam Ḥammād sendiri waktu itu adalah salah seorang ulama besar kalangan *ṭabī’in* di Kūfah. Dan disebutkan dalam banyak buku bahwa Imam Abū Ḥanīfah selalu menyertai gurunya ini sampai akhir hayatnya, yaitu selama 18 tahun. Bahkan beliau menyamakan posisi gurunya ini dengan orang tuanya.

Pasca meninggalnya Imam Ḥammād bin Abī Sulaimān pada tahun 120 H., posisinya digantikan oleh Imam Abū Ḥanīfah. Dalam mengajar beliau sering mengemukakan hal-hal baru dan sering juga mendebat banyak pendapat, bahkan dalam mengajar tidak sekali beliau menggunakan metode diskusi dengan murid-muridnya, dan jika sebuah pembahasan sampai kepermasalahan adat, *maṣlaḥah* dan masalah



Bagi Imam Abū Ḥanīfah, murid-muridnya merupakan orang-orang yang paling beliau cintai, seperti hubungan bapak dengan anak. Bahkan ketika Abū Yūsuf terlambat menghadiri majlis beliau karena membantu orang tuanya dalam mencari nafkah hidup, beliau panggil dan setelah mengetahui alasannya beliau tidak sungkan-sungkan memberikan 100 dirham agar Abū Yūsuf tidak lari lagi dari majlis beliau, dan hal ini tidak terjadi sekali saja.

Adapun metodenya dalam *fiqh* sebagaimana perkataan beliau sendiri: “Saya mengambil dari *Kitābullāh* jika ada, jika tidak saya temukan saya mengambil dari *Sunnah* dan *Āsar* dari Rasuīullah saw yang *ṣahih* dan saya yakini kebenarannya, jika tidak saya temukan di dalam *Kitābullāh* dan *Sunnah* Rasulullah saw, saya cari perkataan Sahabat, saya ambil yang saya butuhkan dan saya tinggalkan yang tidak saya butuhkan, kemudahan saya tidak akan mencari yang di luar perkataan mereka, jika permasalahan berujung pada Ibrāhīm, Sya’biy, al-Hasan, Ibnu Sīrīn dan Sa’id bin Musayyib (karena beliau menganggap mereka adalah mujtahid) maka saya akan berijtihad sebagaimana mereka berijtihad”.



- 5) *Qiyās*, beliau menggunakannya jika mendapatkan permasalahan yang tidak ada nash yang menunjukkan solusi permasalahan tersebut secara langsung atau tidak langsung (*dilālah isyārah* atau *taḍammuniyyah*). Disinilah nampak kelebihan Imam Abū Ḥanīfah dalam mencari sebab (*'iliat*) hukum.
- 6) *Istiḥsān*, dibandingkan imam-imam yang lain, Imam Abū Ḥanīfah adalah orang yang paling sering menggunakan *istiḥsān* dalam menetapkan hukum.
- 7) *'Urf*, dalam masalah ini Imam Abū Ḥanīfah juga termasuk orang yang banyak memakai *'urf* dalam masalah-masalah *furū' fiqh*, terutama dalam masalah sumpah (*yamīn*), lafaz *ṭalāq*, pembebasan budak, akad dan syarat.

Diantara ulama-ulama yang semasa dengannya di Kūfah adalah Imam Sufyān aš-Šauriy r.a (ulama hadits), Imam Syārik bin ‘Abdillāh an-Nakhā’iy (ulama *fiqh*) dan Muḥammad bin ‘Abdurrahmān bin Abī Lailā (ulama *fiqh*). Hubungan antara Imam Abū Ḥanīfah dengan mereka tidak terlalu baik, perbedaan antara ahli hadits dengan ahli ra’yi berpengaruh



kepada hubungan beliau dengan Imam aš-Šauriy r.a, sedangkan dengan Imam Ibnu Abī Lailā r.a, yang waktu itu menjadi *qāḍiy* di Kūfah, kurang harmonis juga karena beliau sering mengeluarkan fatwa yang berbeda dengan Imam Ibnu Abī Lailā r.a, sehingga kadang-kadang ada peringatan dari pemimpin negeri agar Imam Abū Ḥanīfah tidak mengeluarkan fatwa, sementara dengan Imam Syārik r.a ada sedikit persaingan karena satu masa. Meskipun demikian Imam Abū Ḥanīfah r.a tetap memiliki kharisma yang tinggi di kalangan masyarakat, terbukti banyak sekali murid-muridnya yang menjadi ulama besar, diantara muridnya yang terkenal adalah Imam Abū Yūsuf Ya'qūb bin Ibrāhīm al-Anṣāriy, Imam Muḥammad bin Ḥasan bin Farqad asy-Syaibāniy (kemudian dikenal sebagai ṣāhiba Abī Ḥanīfah ulama besar maḥab Ḥanafiy), Imam Zufar bin Huẓail bin Qais al-Kūfiy dan Imam Hasan bin Ziyād al-Lu'lu'iy.

Lengkapanya beliau bernama Abū Yūsuf Ya'qūb bin Ibrāhīm bin Ḥabīb al-Anṣāriy. Lahir kira-kira tahun 113 H dan meninggal tahun 182 H. Banyak ulama yang menganggap beliau adalah seorang *mujtahid muṭlaq*, setara dengan Imam Abū Ḥanīfah, Imam Malik, Imam Syāfi'iy dan Imam Ahmad bin Hanbal.

Imam Abū Ḥanīfah sendiri. Abū Yūsuf mengambil *fiqh* dan belajar banyak dari Abu Ḥanīfah, disebutkan sekitar 17 tahun lamanya Abū Yūsuf melakukan *mulāzamah* dengan Abū Ḥanīfah dan bisa dikatakan Abū Ḥanīfahlah yang mengisi pundi-pundi ilmu Abū Yūsuf sehingga menjadi seorang yang tidak kalah hebatnya dari Abū Ḥanīfah sendiri, sedang dari Ibnu Abī Lailā, Abū Yūsuf banyak belajar tentang *qaḍā'* (hukum dan kehakiman), dengan demikian Abū Yūsuf telah mendapatkan *fiqh* secara ilmu dan praktek sekaligus dari dua tokoh tersebut. Namun demikian Imam Abū Ḥanīfah tetap orang yang paling berpengaruh pada dirinya bahkan beliau menganggap Abū Ḥanīfah lebih dari orang tua dan keluarganya sendiri.

Disamping belajar khusus dari kedua Imam di atas, Abū Yūsuf juga belajar dari banyak ulama-ulama besar lainnya, seperti Abū Ishāq asy-Syaibāniy, 'Abdul Malik bin Juraih, al-Hajjāj bin Arṭah, Sufyān bin 'Uyaynah, 'Ubaidillāh bin 'Umar, 'Abdullāh bin 'Umar, Malik bin Anas, Muḥammad bin Ishāq (pengarang *al-Magaziy*), dan ulama-ulama lainnya dari Hijaz, Irak dan negeri-negeri lain. Maka tidaklah mengherankan jika beliau dikatakan lebih *faqīh* dari Abū Ḥanīfah, kita saksikan sendiri bagaimana Imam Abū Yūsuf mengambil ilmu dari dua aliran besar *fiqh* ketika itu, *Madrasah ar-Ra'yi* dan *Madrasah al-Hadīṣ*. Yahyā bin Ma'īn berkomentar: "Saya tidak pernah melihat di kalangan *aṣḥāb ar-ra'yi* yang paling *sābit* (kuat) dalam masalah hadits, paling kuat hafalan (*aḥfāḥ*) dan paling *ṣaḥīḥ*





Imam Muḥammad bin Sulaimān (Ibnu Kamāl Basyā) membagi ahli *fiqh* secara umum kepada tujuh tingkatan:

- a. Tingkatan *Mujtahid Agama*, yaitu ulama yang mampu merumuskan kaedah-kaedah *uṣūl* dan mampu menetapkan hukum *furū'* dari empat sumber (*dalīl*) utama secara independen, tanpa *taqlīd* (mengikut) kepada siapapun, seperti para imam yang empat (Imam Abū Ḥanīfah r.a, Imam Malik r.a, Imam Syafi'iy r.a dan Imam Aḥmad bin Ḥanbal r.a).
- b. Tingkatan *Mujtahid Mazhab*, yaitu ulama yang mampu mengolah *dalīl-dalīl* dan kemudian menghasilkan hukum dengan bantuan kaedah yang telah ditetapkan guru-guru mereka, jadi meskipun di sebagian permasalahan mereka berbeda dengan sang guru, akan tetapi mereka masih mengikut (*taqlīd*) dari sisi kaedah *uṣūl*. Dalam hal ini dalam mazhab Ḥanafiy seperti Imam Abū Yūsuf r.a, Muḥammad bin Ḥasan r.a dan murid-murid Abū Ḥanīfah r.a lainnya.
- c. Tingkatan *Mujtahid* dalam permasalahan-permasalahan yang tidak ditemukan riwayat atau sumber langsung dari *ṣāhib al-madẓhab* (Imam Abū Ḥanīfah r.a), namun mereka tidak mampu menyalahi pendapat Imam, baik dalam segi *uṣūl* maupun *furū'*, hanya saja mereka menetapkan hukum-hukum dengan menggunakan kaedah *uṣūl* yang ditetapkan Imam.



*awla* (inilah yang lebih utama), *hāzā aṣaḥḥur riwāyah* (ini riwayat yang paling benar), *hāzā awḍaḥ* (ini yang paling jelas), *hāzā awfaq lil qiyās* (ini yang paling sesuai dengan *qiyās*) atau *hāzā arfaq lin nās* (ini yang paling ringan bagi manusia). Contoh ulama Ḥanafiy jenis ini seperti Imam Abū Ḥasan al-Qaddūriy dan Imam al-Margināniy, pengarang *al-Hidāyah* (w. 593 H).

- f. Tingkatan *Muqallid* (*Muqallid*) yang mampu membedakan antara *al-aqwa* (yang paling kuat), *al-qawiy* (yang kuat), *ad-da'if* (yang lemah), *ẓāhir ar-riwāyah*, *ẓāhir al-maẓhab* dan *riwāyah nādirah*, biasanya mereka tidak mengutip perkataan-perkataan yang ditolak dalam maẓhab dan riwayat-riwayat yang lemah. Mereka adalah ulama-lama pengarang *matan* yang sering dipakai di kalangan maẓhab, seperti pengarang kitab *al-kanz*, pengarang kitab *al-mukhtār*, pengarang kitab *al-wiqāyah*, dan pengarang kitab *al-majma'*.
- g. Tingkatan *Muqallid* yang tidak mampu melakukan hal-hal yang di atas, dan mengenai kelompok ini Ibnu Kamāl Basya mengomentari: "Celakalah siapa yang mengikuti mereka ini!"

## 5. Tingkatan Jenis Permasalahan Dan Buku Referensi Dalam Mazhab Hanafiy

Salah satu ciri khas mazhab Hanafiy adalah dalam metode pengajaran dan penulisan buku, mereka biasa mengumpulkan masalah-masalah *furū'* untuk kemudian dicarikan hukumnya dan diwariskan disetiap generasi, dari

Terdapat 3 jenis permasalahan yang diriwayatkan dalam buku-buku referensi mazhab Hanafiy:

- Permasalahan ini disebut *ẓāhir ar-riwāyah* karena diriwayatkan dari Imam Muḥammad secara yakin dan pasti, *mutawātir* atau paling kurang *masyhūr*. Ada satu buku lain yang juga dikenal sebagai buku asasi yaitu buku *al-Kāfiy* karangan Imam Muḥammad bin Muḥammad bin



Diantara buku-buku penting yang juga menjadi pegangan pokok seperti kitab *al-Hidāyah Syarh Bidāyah al-Mubtadi'* karangan Syaykhul

Akan tetapi, disamping buku-buku diatas, masih banyak buku-buku lain yang menjadi referensi penting dalam *fiqh* Hanafiy, baik itu berupa *mutun*, *mukhtasar*, maupun *syuruh*.

Mazhab Ḥanafiy banyak berkembang awalnya di Bagdād dan Kūfah, namun kemudian terus meluas sampai ke daerah-daerah lain, khususnya yang pernah berada di bawah kekuasaan ‘Abbasiyah, seperti Mesir, Syam, Tunis, Jazair, Tripoli, Yaman, India, Parsi, Romawi, Cina, Bukhara, Afghan, Turkistan bahkan Brazil. Sampai saat ini bisa dikatakan mazhab Ḥanafiy banyak dipakai di Irak, Syam/ Syiria, India, Turkistan, negara-negara Kaukasia, Turki, Albania dan di kawasan Balkan.

- a. Banyaknya murid Abū Ḥanīfah dan perhatian mereka dalam menyebarkan dan menjelaskan pendapat-pendapat Imam mereka.
- b. Mazhab Ḥanafiy dijadikan sebagai mazhab resmi negara semasa kekuasaan 'Abbasiyyah.
- c. Pengangkatan Imam Abū Yūsuf sebagai *qāḍi al-quḍah* (hakim tertinggi) yang memiliki kekuatan dalam memilih *quḍahī* (hakim-hakim) di daerah-

Yūsuf dalam memutuskan perkara-perkara.

d. Perhatian besar ulama-ulama mazhab ini dalam percepatan pertumbuhan mazhab Hanafiy dengan mencurahkan kemampuan mereka dalam mencari *illat* hukum dan sekaligus mempraktekannya dalam banyak masalah-masalah baru yang timbul. Hal ini menjadi mazhab ini selalu memiliki solusi-solusi dalam setiap permasalahan.

## B. Perwalian dalam Nikah Menurut Perspektif Mazhab Hanafy

## 1. Pengertian

Perwalian, dalam literatur fikih Islam disebut dengan *al-walāyah* (*al-wilāyah*), seperti kata *ad-dalālah* yang juga disebut dengan *ad-dilālah*. Secara etimologis, dia memiliki beberapa arti. Di antaranya adalah cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*an-naṣrah*) seperti dalam penggalan ayat *waman yatawalla allāha wa rasulahu* dan kata-kata *ba'dhum awliya'u ba'din*, juga berarti kekuasaan/ otoritas (*as-sulṭah wal-qudrah*) seperti dalam ungkapan *al-wāliyy* yang berarti "orang yang mempunyai kekuasaan". Sedangkan hakikat dari *al-walāyah* (*al-wilāyah*) adalah *tawalliy al-amr* (mengurus/ menguasai sesuatu).<sup>2</sup>

Adapun yang dimaksud dengan perwalian dalam terminologi para *fuqaha'* ialah kekuasaan/ otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara

<sup>2</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, h. 134

langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain.<sup>3</sup>

Orang yang mengurus/ menguasai sesuatu (akad/ transaksi), disebut wali seperti dalam penggalan ayat: *falyumlil waliyyuhū bil ‘adli*. Kata *al-waliyy muannaṣ*-nya *al-waliyyah* dan jamaknya *al-awliyā’*, berasal dari kata *walā - yali - walyan - wa walāyatan*, secara harfiah berarti yang mencintai, teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikut, pengasuh dan orang yang mengurus perkara (urusan) seseorang.

Atas dasar pengertian semantik kata wali di atas, dapatlah dipahami dengan mudah mengapa hukum Islam menetapkan bahwa orang yang paling berhak untuk menjadi wali bagi kepentingan anaknya adalah ayah. Alasannya, karena ayah adalah tentu orang yang paling dekat, siap menolong, bahkan yang selama itu mengasuh dan membiayai anak-anaknya. Jika tidak ada ayahnya, barulah hak perwaliannya digantikan oleh keluarga dekat lainnya dari pihak ayah.

Para ulama dari mazhab Hanafiy, membedakan perwalian ke dalam tiga kelompok, yaitu perwalian terhadap jiwa (*al-walāyah ‘alan-nafs*), perwalian terhadap harta (*al-walāyah ‘alal-māl*), serta perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus (*al-walāyah ‘alan-nafsi waf-māli ma‘an*).<sup>4</sup>

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 134

<sup>4</sup> *Ibid.* h. 134-135



Menurut pemikiran Imam Abū Ḥanīfah perempuan mempunyai peran dan hak penuh atas dirinya mengenai perkawinannya, sehingga tidak memerlukan adanya wali atas dirinya. Namun, ada kriteria dan syarat yang harus dipenuhi agar mempunyai wewenang atas dirinya, yaitu:<sup>7</sup>

a. Calon suami harus *se-kufu'* (sepadan);

**Menurut mazhab Hanafiy yang menjadi dasar *kafa'ah* adalah:**

- 1) **nasab**, yaitu keturunan atau kebangsaan;
- 2) **Islam**, yaitu dalam silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam;
- 3) **hurfah**, yaitu profesi dalam kehidupan;
- 4) **dināyah** atau tingkat kualitas keberagamaannya dalam Islam; dan
- 5) **kekayaan**.<sup>8</sup>

**b. Mahar yang diberikan tidak kurang dari *mahar misil*.**

Ukuran mahar *misil* ialah sebesar mahar yang diterima oleh perempuan lain dalam keluarganya. Mazhab Hanafiy secara spesifik memberi batasan mahar *misil* itu setara dengan mahar yang pernah diterima oleh saudaranya, bibinya, dan anak saudara pamannya yang sama dan sepadan umurnya, kecantikannya, kekayaannya, tingkat keberagamaannya, negeri tempat tinggalnya, dan masanya dengan istri yang akan menerima mahar tersebut.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, h. 32

<sup>8</sup>Jāziriyy, al-, Abd al-Rahmān, *Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, h. 54-61

<sup>9</sup>Ibnu al-Hummām, *Syarh Fath al-Qadīr*, h. 368

Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka orang tua boleh mengajukan kepada pengadilan untuk mencegah perkawinan dan orang tua (wali) boleh membatalkan perkawinannya. Akan tetapi sebaliknya, apabila syarat-syarat tersebut sudah dipenuhi, maka orang tua (wali) tidak boleh melarang atau mencegah perkawinannya.

Menurut Imam Abū Ḥanīfah bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik wanita yang masih gadis atau janda. Tidak ada seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya dengan syarat orang yang dipilihnya itu *se-kufu'* (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahar *misil*.<sup>10</sup>

Baligh dan berakalnya seorang wanita merupakan salah satu syarat bagi seseorang untuk mempunyai wewenang atas dirinya sendiri untuk melaksanakan pernikahannya sendiri.

Ibnu Rusyd juga menyebutkan, bahwa wanita boleh melangsungkan akad nikahnya (menjadi *mu'aqqid*) tanpa wali, jika pilihannya *se-kufu'* atau sepadan.<sup>11</sup>

Menurut mazhab Ḥanafiy, perwalian dalam nikah merupakan syarat *ṭamām* (penyempurna) dan bukan merupakan syarat sahnya nikah, tetapi sunnah saja hukumnya, boleh ada wali dan boleh tidak ada.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, h.354

<sup>11</sup> Ibn Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtasid*, h.214

Artinya: Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu habis idahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya. (Al-Baqarah [2]: 232)<sup>14</sup>

وَأَنزَلْنَا إِلَهُكَ مِنَ الْجَبَلِ أَن تَتْلِي خَرِيدًا وَسُيِّرَ بِالْحَدِيدِ

b. Al-Qur'an Surat A-Baqarah ayat 232

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuannya itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. (Al-Baqarah [2]: 230)<sup>13</sup>

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

a. Al-Qur'an Surat A-Baqarah ayat 230

iii.

berdasarkan *naṣ al-Qur'an*, as-Sunnah, dan logika, sebagai berikut di bawah

Dalil-dalil yang dijadikan *hujjah* oleh mazhab Hanafiy adalah

### 3. Dasar Hukum

*kurang dari mahar misil.*

asalkan calon suaminya se-kufu' (sepadan) dan mahar yang diberikan tidak

dan berakal sehat boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali

Dengan demikian, menurut mazhab Hanafiy, wanita yang telah dewasa



**Setelah berita ini disampaikan kepada Rasulullah SAW, maka**

**Menurut mazhab Hanafiy, dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat**

c. Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 234

[illegible]

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغَ

أَحَلَّهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

**Artinya:** *Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber-'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddah-nya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (Al-Baqarah [2]: 234)*<sup>16</sup>

Pada ayat di atas terdapat kata kerja "*fa'alna*", yang artinya mengerjakan, yang pelakunya adalah wanita-wanita yang suaminya telah meninggal dunia tersebut. Ayat itu menunjukkan bahwa akad nikah yang dilakukan oleh wanita yang suaminya telah meninggal dunia dan segala sesuatu yang dikerjakannya tanpa menggantungkan kepada wali atau izinnya adalah sah.

Jadi, wanita menurut mazhab Hanafiy mempunyai hak penuh terhadap urusan dirinya, termasuk menikah tanpa bantuan wali.<sup>17</sup>

d. Hadis riwayat *Jamā'ah*.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَنْكُحُ الْآيِمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ

وَلَا الْبَكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ إِذْنُهَا؟ أَنْ تُسَكَّتَ. (رواه الجماعة)

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 57

<sup>17</sup>M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab Fiqh*, h. 136









harta dan memilih suami. Sedangkan dimintanya wali untuk menikahkannya ialah agar tidak dianggap tidak punya rasa malu saja, tetapi apabila ia melangsungkan akad nikahnya sendiri maka diperbolehkan.<sup>22</sup>

Jadi, pembatalan nikah ialah merusak nikah atau membatalkan perkawinan antara suami istri yang dilaksanakan oleh hakim, karena sebab-sebab yang dianggap sah untuk melaksanakan dan menetapkan adanya *fasakhi* itu, berdasarkan tuntutan dan keberatan-keberatan yang diajukan pihak istri atau suami.

## 2. Bentuk Pembatalan Nikah

Dari segi alasan terjadinya pembatalan nikah secara garis besar dapat dibagi kepada dua sebab:

*Pertama*, perkawinan yang sebelumnya telah berlangsung, ternyata kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik tentang rukun, maupun syaratnya; atau pada perkawinan tersebut terdapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan. Bentuk seperti ini yang dalam kitab fikih disebut dengan *faskh*. Bentuk ini dari segi diselesaikannya di pengadilan terbagi menjadi dua:

- a. Tidak memerlukan pengaduan dari pihak suami atau istri, atau dalam artian hakim dapat memutuskan dengan telah diketahuinya kesalahan perkawinan sebelumnya melalui pemberitahuan oleh siapa saja. Umpamanya akad nikah tidak dilakukan di hadapan saksi, sedangkan hukum yang berlaku menyatakan bahwa saksi itu adalah rukun dalam perkawinan; atau yang menikahkan adalah laki-laki yang kemudian ternyata adalah ayah angkat. Hal ini menyalahi ketentuan tentang wali.







#### 4. Faktor Penyebab Terjadinya Pembatalan Nikah

Pembatalan nikah dalam bentuk pertama, yaitu perkawinan yang sebelumnya telah berlangsung, ternyata kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik tentang rukun, maupun syaratnya; atau pada perkawinan tersebut terdapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan, jelas-jelas tidak memenuhi persyaratan perkawinan atau terdapat padanya halangan (*mawānī'*) nikah. Dalam ketentuan umum yang disepakati semua pihak ialah bahwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun atau terdapat padanya *mawānī'* tersebut dinyatakan batal.

Ketentuan batal itu berlaku untuk memulai (*ibtida'*) dan juga berlaku untuk melanjutkan (*dawām*). ulama sepakat bahwa bila kesalahan atau kekurangan itu terjadi sebelum berlangsung, maka wajib dihindarkan atau dicegah dan bila terjadi setelah berlangsung, wajib dibatalkan.

Di dalam mazhab Hanafi, dengan bolehnya perempuan dewasa mengawinkan dirinya sendiri, bila si anak perempuan mengawinkan dirinya dengan laki-laki yang tidak se-*kufu'* dengannya, wali yang juga memiliki hak atas *kafa'ah* berhak mengajukan pencgahan perkawinan jika belum terjadi perkawinan atau pembatalan bila sudah terjadi perkawinan. Demikian pula bila anak perempuan itu mengawinkan dirinya dengan mahar yang kurang

dari mahar *misil*, wali juga dapat mengajukan pencegahan atau pembatalan nikah.<sup>30</sup>

Adapun pembatalan nikah dalam bentuk kedua, yang disebut *khiyār fasakh*, yaitu pembatalan nikah yang disebabkan oleh karena terjadinya sesuatu pada suami atau istri atau keduanya yang tidak memungkinkan dilanjutkannya ikatan perkawinan, maka uraiannya sebagai berikut.

a. Pembatalan nikah karena *syiqāq*

Salah satu penyebab terjadinya *khiyār fasakh* ini adalah pertengkaran antara suami istri yang tidak mungkin didamaikan. Pertengkaran ini disebut *syiqāq*.<sup>31</sup> Ketentuan tentang *syiqāq* dapat ditemukan dalam firman Allah:

وَأِنْ حَقِّمُ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا

يُوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

**Artinya:** *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.* (An-Nisā’ [4]: 35)<sup>32</sup>

**b. Pembatalan nikah karena cacat**

<sup>30</sup> *Ibid.* h. 244

<sup>31</sup> *Ibid.* h. 245-253

<sup>32</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 123

Yang dimaksud dengan cacat di sini adalah cacat yang terdapat pada diri suami atau istri, baik cacat jasmani atau cacat rohani atau jiwa. Cacat tersebut mungkin terjadi sebelum perkawinan, namun tidak diketahui oleh pihak lain atau cacat yang berlaku setelah terjadi akad perkawinan, baik ketahuan atau terjadinya itu setelah suami istri tersebut bergaul atau belum.

Dalam hal ini mazhab Hanafiy berpendapat bahwa tidak boleh berlaku *khiyār fasakh* karena ada cacat tubuh kecuali bila suami mengalami impotensi atau terpotong alat kelaminnya.<sup>33</sup>

Mazhab Ḥanafiy membatasi *khiyār fasakh* itu pada cacat yang terdapat pada alat kelamin, yaitu impotensi dan terpotong zakar pada laki-laki dan *ratqa* (tumbuh daging di alat vital perempuan) dan *qarnā'* (tumbuh tulang di alat vital perempuan).

**c. Pembatalan nikah karena ketidakmampuan suami memberi nafkah**

Suami selama dalam masa perkawinan berkewajiban memberi nafkah untuk istrinya, baik dalam bentuk belanja, pakaian, dan tempat tinggal. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin saja terjadi suami kehilangan sumber pencahariannya, sehingga dia tidak dapat menjalankan kewajibannya itu. Dalam keadaan tertentu istri dapat mengatasi masalah rumah tangga dengan cara dia turun tangan mencari nafkah. Tetapi

<sup>33</sup>Ibnu Qudāmah, Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad, *Al-Mugniy*, h. 184





perkawinannya, mereka harus melakukan akad nikah baru, baik dalam waktu mantan istri menjalani masa *'iddah* dari suaminya itu atau setelah selesainya masa *'iddah*.

Akibat yang lain dari pembatalan nikah ialah tidak mengurangi bilangan *ṭalāq*. hal itu berarti hak suami untuk men-*ṭalāq* istrinya maksimal tiga kali tidak berkurang. Dalam bahasa sederhana, pembatalan nikah boleh terjadi berkali-kali tanpa batas.



**DESKRIPSI PERKARA PEMBATALAN NIKAH  
DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG**

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung RI sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

## 1. Wilayah Yuridiksi dan Kewenangan Pengadilan Agama Jombang

- a. Kecamatan Jombang, dengan 20 desa/ kelurahan.
- b. Kecamatan Diwek, dengan 18 desa/ kelurahan.
- c. Kecamatan Gudo, dengan 18 desa/ kelurahan.

[illegible]

- d. Kecamatan Perak, dengan 13 desa/ kelurahan.
- e. Kecamatan Tembelang, dengan 15 desa/ kelurahan.
- f. Kecamatan Megaluh, dengan 13 desa/ kelurahan.
- g. Kecamatan Bandarkedung Mulyo, dengan 11 desa/ kelurahan.
- h. Kecamatan Plandaan, dengan 13 desa/ kelurahan.
- i. Kecamatan Kudu, dengan 10 desa/ kelurahan.
- j. Kecamatan Ngusikan, dengan 12 desa/ kelurahan.
- k. Kecamatan Ploso, dengan 12 desa/ kelurahan.
- l. Kecamatan Kabuh, dengan 16 desa/ kelurahan.
- m. Kecamatan Mojoagung, dengan 18 desa/ kelurahan.
- n. Kecamatan Kesamben, dengan 14 desa/ kelurahan.
- o. Kecamatan Peterongan, dengan 14 desa/ kelurahan.
- p. Kecamatan Jogoroto, dengan 11 desa/ kelurahan.
- q. Kecamatan Sumobito, dengan 21 desa/ kelurahan.
- r. Kecamatan Mojowarno, dengan 19 desa/ kelurahan.
- s. Kecamatan Ngoro, dengan 13 desa/ kelurahan.
- t. Kecamatan Bareng, dengan 13 desa/ kelurahan.
- u. Kecamatan Puduk, dengan 9 desa/ kelurahan.

Sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Jombang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syariah.

Struktur organisasi badan Pengadilan Agama Jombang berdasarkan atas Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 11 Tahun 1978 tentang susunan organisasi dan tata kerja Pengadilan Agama, yang kemudian disempurnakan dalam buku pedoman himpunan susunan struktur organisasi dan tata kerja Departemen Agama Daerah Tahun 1986/1987. Kemudian disempurnakan lagi dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama bab II. Mengenai susunan Pengadilan Agama yang terakhir pelaksanaannya diatur dalam surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor: KMA/004/sk/II/1992 dan surat edaran Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 1996.





Adapun duduk perkara yang terjadi ialah sebagai berikut:

Pada tanggal 9 April 2007 pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek telah menikahkan termohon, Sumilah binti Suparno dengan seorang laki-laki bernama Seniman bin Serun di KUA Kecamatan Diwek dan mendapat Kutipan Akta Nomor: 201/32/IV/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang tanggal 09 April 2007.

Pada saat pernikahan Sumilah menggunakan wali hakim, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.50.000,- dengan disaksikan dua orang saksi Husaini dan Muhammad Kamaludin Hasan. Pelaksanaan akad nikah tersebut berlangsung baik dan lancar. Di atas sumpahnya termohon telah menyatakan bahwa wali nasab, Suparno orang tua termohon tidak jelas alamatnya.

Setelah melangsungkan perkawinan termohon dan suaminya telah hidup bersama sebagaimana halnya suami-isteri. Selama kehidupan rumah tangga antara termohon dan suaminya rukun tentram dan harmonis. Namun, sejak tanggal 26 Mei rumah tangganya terusik dengan datangnya seorang laki-laki yang mengaku bernama Suparno (orang tua termohon) menghadap ke KUA

Kecamatan Diwek dan pengakuannya telah dikukuhkan dengan sumpah dan  
dibenarkan pula oleh termohon.

Berhubungan dengan hal tersebut pemohon sebagai pencatat dan juga sebagai wali hakim dari pernikahan tersebut merasa terdapat kesalahan dalam penggunaan wali nikah. Karenanya, dipandang perlu untuk segera mengajukan pembatalan.

Atas dasar alasan-alasan tersebut, pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jombang untuk berkenan memanggil dan memeriksa termohon untuk dibatalkan nikahnya.

Setelah Pengadilan Agama Jombang memanggil dan memeriksa pemohon dan termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Membatalkan pernikahan termohon Sumilah binti Suparno dengan Seniman bin Serun yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Diwek pada tanggal 09 April 2007.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>2</sup>

<sup>2</sup>Salinan Putusan Nomor: 724/Pdt.G/2007/PA.Jbg.

Dalam perkara nomor: 724/Pdt.G/2007/PA.Jbg hakim memutuskan untuk membatalkan perkawinan termohon yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dan memerintahkan kepada Kepala KUA untuk mencoret perkawinan termohon dengan Seniman bin Serun dari unsur register nikah.

1. Pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon dan termohon masing-masing hadir di persidangan dan setelah persidangan surat permohonan pemohon ternyata isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.
2. Dalam jawabannya secara lisan ternyata termohon telah membenarkan dalil-dalil permohonan pemohon.
3. Untuk menguatkan dalil-dalinya pemohon mengajukan alat bukti berupa:
  - a. Tanda terima Kutipan Akta Nikah (P.1)
  - b. Foto copy Kutipan Akta Nikah (P.2)
4. Di samping itu, pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya:



- a. **Hamim Sihabudin bin Mas'ud, umur 34 tahun, pekerjaan PPT KUA Diwek, alamat Sumber Mulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, yang menerangkan bahwa:**
- 1) saksi kenal dengan termohon dan suaminya**
  - 2) saksi telah menyaksikan akad nikah antara keduanya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek, Jombang.**
  - 3) pernikahan tersebut menggunakan Wali Hakim, yakni Kepala KUA Kecamatan Diwek Bapak Ali Marwan karena wali termohon tidak diketahui alamatnya.**
  - 4) mengenai maharnya saksi lupa dengan nominalnya.**
- b. **Khusaim bin Sarkum, umur 54 tahun, pekerjaan penghulu, bertempat tinggal di Desa Kwaron, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, yang menerangkan bahwa:**
- 1) saksi kenal dengan termohon karena satu desa dengan termohon.**
  - 2) benar termohon telah menikah dengan laki-laki bernama Seniman.**
  - 3) saksi menyaksikan pernikahan keduanya, bahkan saksi ikut tanda tangan dibuku nikah.**
  - 4) pernikahan tersebut dilakukan dengan menggunakan Wali Hakim karena wali termohon tidak diketahui alamatnya, bahkan termohon telah disumpah oleh Kepala KUA ternyata termohon menyatakan walinya tidak diketahui alamatnya.**

5. Pemohon juga menghadirkan wali termohon, yaitu ayah kandung termohon sendiri yang bernama Suparno bin Joyo Kalil, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Ceweng Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya, menerangkan bahwa:

- Selain itu, dalam memutus perkara tersebut majelis hakim juga memiliki dasar hukum sebagai berikut:

1. Pemohon adalah Pejabat KUA Kecamatan Diwek dimana pernikahan antara termohon dan seorang laki-laki bernama Seniman telah tercatat di KUA Kecamatan tersebut sehingga pemohon dalam mengajukan permohonannya telah memenuhi ketentuan pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.



وَكَذَا يُزَوِّجُ عِنْدَ غِيَةِ الْوَلِيِّ مَسَافَةَ الْقَصْرِ

Artinya: “Boleh pula bagi wali hakim menikahkan seorang perempuan bilamana walinya gaib masāfatul qaṣr”.

8. Menurut pengakuan wali di bawah sumpahnya, bahwa pada saat perkawinan berlangsung dia berada di Desa Ceweng, Kecamatan Diwek, sedangkan jarak antara Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dengan Ceweng tidak mencapai *masāfatul qasr*. Oleh karenanya, pernikahan antara termohon dengan Seniman bin Serun menurut hukum Islam adalah tidak sah atas dasar kaidah Hukum Islam dalam Kitab *Al-Fiqhul Islam al-Mazzahibul Arba'ah* Juz 4 halaman 40, menyebutkan:

فَإِذَا رَوَّجَ الْحَاكِمُ ثُمَّ حَضَرَ الْوَلِيُّ وَقَالَ إِنِّي كُنْتُ قَرِيئاً مِنَ الْبَلَدَةِ عِنْدَ الْعَقْدِ لَا يَصِحُّ

**Artinya:** “Apabila hakim telah menikahkan seorang perempuan dengan pria atas dasar walinya gaib kemudian wali wanita tersebut datang dan menyatakan bahwa ketika akad tersebut dia berada di daerah yang tidak jauh maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah”.

9. Karena pernikahan antara termohon dengan laki-laki bernama Seniman bin Serun sudah tidak sah, maka permohonan pemohon agar pernikahan termohon dengan Seniman bin Serun agar dibatalkan dapat diterima dan dikabulkan.

Setelah penulis melakukan wawancara dengan hakim yang menangani perkara tersebut, selain menggunakan pertimbangan dan dasar hukum di atas, beliau juga menggunakan pertimbangan Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan, "*Perkawinan adalah sah,*



## BAB IV

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JOMBANG  
NOMOR: 724/Pdt.G/2007/PA.Jbg TENTANG PEMBATALAN NIKAH  
DENGAN ALASAN TIDAK ADA IZIN WALI BERDASARKAN  
PERSPEKTIF MAZHAB HANAFIY**

**A. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Jombang dalam Membatalkan Nikah karena Tidak Ada Izin Wali**

Pada dasarnya, dasar hukum yang digunakan Pengadilan Agama dalam memutus suatu perkara ada dua macam, yaitu Peraturan Perundang-undangan dan hukum syara'.

Peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan landasan hukum oleh hakim di Pengadilan Agama adalah Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-undang No.20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-undang No.13 tahun 1985 tentang Bea Materai, PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974, PP No.28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, PP No.10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, RBG Stb. No.227 tahun 1927 Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (RIB=HIR) Stb.1941 No.44,

Sedangkan dasar hukum syara' diusahakan mencarinya dari al-Qur'an baru Hadis, baru Qaul Fuqaha, yang diterjemahkan juga menurut bahasa hukum. Mengutip al-Qur'an harus menyebut nomor surat, nama surat, nomor ayat. Mengutip Hadis harus menyebut siapa sanadnya, bunyi matannya, siapa pentakhrijnya dan disebutkan pula dari kitab apa, kitab ini harus disebut siapa pengarangnya, nama kitab, penerbit, kota tempat tinggal penerbit, tahun terbit, jilid dan halamannya. Mengutip Qaul Fuqaha juga harus menyebut kitabnya selengkapya seperti diatas, apalagi jika ada kitab yang sama judulnya tetapi lain pengarangnya. Selain itu, para hakim juga menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan dalam menutup suatu perkara.

Dalam menangani perkara nomor: 724/Pdt.G/2007/PA.Jbg majelis hakim Pengadilan Agama Jombang memutuskan untuk membatalkan perkawinan termohon, Sumilah binti Suparno, yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang karena tidak ada izin wali, dan memerintahkan kepada





Menurut mazhab Hanafiy, perwalian dalam nikah merupakan syarat *tamām* (penyempurna) dan bukan merupakan syarat sahnya nikah, tetapi sunnah saja hukumnya, boleh ada wali dan boleh tidak ada. Wanita boleh

Dalam hal ini dalil-dalil yang dijadikan *hujjah* oleh mazhab Hanafiy sebagai dasar hukum kebolehan seorang wanita melangsungkan akad nikah tanpa wali adalah berdasarkan *naş* Al-Qur'an, 'As-Sunnah, dan logika. Di antaranya adalah:

- Dalam ketiga ayat tersebut, akad dinisbatkan kepada perempuan, hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak melakukan pernikahan secara langsung (tanpa wali).

2. Perempuan bebas melakukan akad jual-beli dan akad-akad lainnya, karena itu ia bebas melakukan akad nikahnya. Karena tidak ada perbedaan hukum antara akad nikah dengan akad-akad lainnya.

Hal ini berdasarkan Hadits Nabi: *“Orang-orang yang tidak mempunyai jodoh lebih berhak atas perkawinan dirinya daripada walinya, dan gadis itu dimintakan persetujuannya untuk dinikahkan dan tanda ijinnya ialah diamnya”* (Hadits Bukhari Muslim).

Pertama, dari segi kedewasaan berdasarkan data yang ada Sumilah ketika melangsungkan akad nikah dengan Seniman ialah seorang janda mati yang berumur 52 tahun. Ini membuktikan bahwa Sumilah waktu itu termasuk kategori wanita dewasa (*baligah*).

Ketiga, dari segi *kafa'ah*, status Sumilah ialah seorang janda, beragama Islam, dengan pekerjaan sebagai tani. Sedangkan Seniman ialah seorang duda,

beragama Islam, dengan pekerjaan swasta. Hal ini menunjukkan bahwa antara Sumilah dan Seniman terdapat kesepadanan atau ke-*kufu'*-an.

Keempat, dari segi mahar yang diberikan Seniman kepada Sumilah apakah sudah mencapai mahar *misil*, bahwa maharnya waktu itu berupa uang senilai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan secara tunai. Ukuran mahar *misil* ialah mahar yang setara dengan mahar yang pernah diterima oleh saudaranya, bibinya, dan anak saudara pamannya yang sama dan sepadan umurnya, kecantikannya, kekayaannya, tingkat kecerdasannya, tingkat keberagamaannya, negeri tempat tinggalnya, dan masanya dengan istri yang akan menerima mahar tersebut. Dalam hal ini mahar yang diberikan Seniman boleh jadi telah sesuai dan boleh jadi masih kurang dari mahar *misil*. Namun apabila telah sesuai berarti telah terpenuhi syarat bahwa mahar tidak boleh kurang dari mahar *misil*, dan tidak ada alasan bagi wali untuk mencegah perkawinan Sumilah dengan Seniman.

Dengan terpenuhinya keempat syarat tersebut maka Sumilah menurut perspektif mazhab Hanafiy telah boleh dan mempunyai wewenang untuk menikahkan dirinya dengan Seniman bin Serun, lelaki pilihannya itu. Dan bagi wali dari Sumilah tidak berhak lagi mencegah atau membatalkan perkawinan tersebut.

Dengan demikian dasar hukum hakim dalam memutus pembatalan nikah atas Sumilah binti Suparno dengan Seniman bin Scrun tidak berlaku lagi.

1. Tidak memerlukan pengaduan dari pihak suami atau istri, atau dalam artian hakim dapat memutuskan dengan telah diketahuinya kesalahan perkawinan sebelumnya melalui pemberitahuan oleh siapa saja. Umpamanya akad nikah tidak dilakukan di hadapan saksi, sedangkan hukum yang berlaku menyatakan bahwa saksi itu adalah rukun dalam perkawinan; atau yang menikahkan adalah laki-laki yang kemudian ternyata adalah ayah angkat. Hal ini menyalahi ketentuan tentang wali. Atau salah satu pihak keluar dari agama Islam. Hal ini menyalahi persyaratan yang keduanya harus beragama Islam; atau antara suami istri itu ternyata bersaudara atau ada hubungan nasab, *muṣāharah*, atau persusuan. Perkawinan seperti ini harus dibatalkan oleh hakim, baik suami istri itu suka atau tidak, karena yang demikian menyalahi hukum.

1. Tidak memerlukan pengaduan dari pihak suami atau istri, atau dalam artian hakim dapat memutuskan dengan telah diketahuinya kesalahan perkawinan sebelumnya melalui pemberitahuan oleh siapa saja. Umpamanya akad nikah tidak dilakukan di hadapan saksi, sedangkan hukum yang berlaku menyatakan bahwa saksi itu adalah rukun dalam perkawinan; atau yang menikahkan adalah laki-laki yang kemudian ternyata adalah ayah angkat. Hal ini menyalahi ketentuan tentang wali. Atau salah satu pihak keluar dari agama Islam. Hal ini menyalahi persyaratan yang keduanya harus beragama Islam; atau antara suami istri itu ternyata bersaudara atau ada hubungan nasab, *muṣāharah*, atau persusuan. Perkawinan seperti ini harus dibatalkan oleh hakim, baik suami istri itu suka atau tidak, karena yang demikian menyalahi hukum.

2. Perlu adanya pengaduan dari pihak suami atau istri atas dasar masing-masing pihak tidak menginginkan kelangsungan perkawinan tersebut. Dalam arti bila keduanya setuju atau rela untuk melanjutkan perkawinan, perkawinan tidak harus dibatalkan. Umpamanya perkawinan yang dilangsungkan atas dasar adanya ancaman yang tidak dapat dihindarkan. Hal ini menyalahi persyaratan kerelaan dari pihak yang melangsungkan perkawinan. Bila ancaman tersebut telah hilang sebenarnya masing-masing pihak dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Namun bila keduanya telah rela untuk melanjutkan perkawinan, perkawinan tidak dibatalkan oleh hakim.

Dari segi penyelesaiannya di pengadilan, kasus Sumilah semestinya termasuk pembatalan nikah yang tidak memerlukan pengaduan dari pihak suami atau istri. Hakim dapat memutuskan dengan telah diketahuinya kesalahan perkawinan sebelumnya melalui pemberitahuan oleh siapa saja. Hal ini dikarenakan dalam segi perwaliannya dianggap tidak sah, yaitu penggunaan wali hakim tanpa adanya izin dari wali nasab sedangkan wali nasabnya ketika itu berada di tempat yang belum mencapai jarak *masāfatul qasr*. Akan tetapi, sebagaimana dijelaskan di atas apabila perkawinan Sumilah dengan Seniman dilaksanakan berdasarkan konsep nikah tanpa wali perspektif mazhab ḥanafiy, maka pembatalan nikah tidak bisa dilakukan oleh pihak manapun. Akad yang dilakukan Sumilah sebagai wanita dewasa untuk menikahkan dirinya dengan

laki-laki manapun tidak dapat diganggu gugat manakala syarat *kafa'ah* dan *mahar misil* telah terpenuhi.

Dengan adanya konsep nikah tanpa wali yang dibawa mazhab Ḥanafiy, maka hal ini bisa dijadikan sebagai alternatif dalam konteks *al-ahkām fī nafs al-waqf*<sup>6</sup>, yakni hukum sebagai solusi dari beberapa kasus yang terjadi di masyarakat.

# PENUTUP



**Artinya:** “Apabila hakim telah menikahkan seorang perempuan dengan pria atas dasar walinya gaib kemudian wali wanita tersebut datang dan menyatakan bahwa ketika akad tersebut dia berada di daerah yang tidak jauh maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah”.

2. Hasil putusan yang dijatuhkan hakim terhadap kasus Sumilah sebenarnya telah sesuai dengan dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara di atas. Akan tetapi, apabila dianalisis berdasarkan konsep mazhab Hanafiy, maka tidak ada kesesuaian. Di mana perkawinan menurut mazhab Hanafiy dapat terjadi meskipun tanpa adanya campur tangan wali, karena menurut mereka seorang wanita berhak dan boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali apabila ia baligh dan berakal.

## B. Saran

1. Hendaklah menjadi tuntunan untuk senantiasa memelihara, mengevaluasi, dan mengembangkan hukum Islam dalam wujud pemikiran guna merespon dinamika yang terjadi dalam masyarakat.
2. Bagi hakim Pengadilan Agama Jombang hendaknya dalam memutuskan perkara-perkara yang ditanganinya selain tetap berpijak pada dasar hukum positif yang ada seyogyanya juga mempertimbangkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, t.t
- Abu Zahrah, *Al-Aḥwāl Al-Syakhṣiyyah*, Beirut, Dār al-Fikr al-‘Arabiyy, 1950
- Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadits-hadits Muttafaq ‘alaiḥ*, Jakarta, Prenada Media, 2004
- Alianoor Asmuni Basri, *Nikah Tanpa Wali*, t.t
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006
- Asyqar, al-, Umar Sulaiman, *al-Madkhal ilā Dirāsāt al-Madāris wa al-Mazāhib al-Fiqhiyyah*, t.t
- Ibn Rusyd, ‘Abdul Wālid Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtasid Juz II*, Beirut, Dār al-Jīl, 1409 H/1989 M
- Ibnu al-Hummām, *Syarḥ Fath al-Qadīr Juz IV*, Cairo, Mustafa al-Bābiy al-Ḥalabiyy, 1970
- Ibnu Hazmin, *al-Muḥallā*, Mesir, Maṭba‘at al-Jumhūriyyah al-‘Arabiyyah, 1970
- Ibnu Manzūr, *Lisān al-‘Arab Juz III*, Qatar, Dār al-Fikr, 1994
- Ibnu Qudāmah, Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad, *Al-Mugniy*, Riyāḍ, Dār ‘Ālam al-Kutub, 1417 H/1980 M
- Jāziriyy, al-, Abd al-Raḥmān, *Fiqh ‘alā Mazāhib al-Arba‘ah*, Mesir, Maṭba‘ah Tijāriyyah al-Kubrā, t.t
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, 1974

Khallāf, Abdul Wahhāb, *Ahkām al-Ahwal al-Syakhṣiyah fi al-Syarī'at al-Islāmiyyah*, Qurwait, Dār al-Fikr, 1990

M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab Fiqh*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997

M. Fuad Abdul Baqi , *Sunan Ibnu Majah Juz II*, t.1

Mahmud Syalthut, *Fiqh Tujuh Madzhab*, terjemahan Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2000

Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Pengadilan Agama dan Zakat*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006

Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004

Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta, Lentera, 2007

Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Surabaya, Lentera Ilmu, 2002

Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 1999

Sudarsono, *Kamus Hukum*, t.1

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, t.1

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

Team Media Centre, *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama*,